

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERDAGANGAN KOTA
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**



**DINAS PERDAGANGAN KOTA
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
RENJAPERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BABI	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	√			
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29	√			
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30	√			
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√			
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√			
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√			
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√			
	3.3	Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.	√			
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
5	BAB V	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Januari 2024
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung,

WILSON FAISOL, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700323 198903 1 001

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19700218 199303 2 002

Diverifikasi: Tanggal		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.Si Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
2	ZELDAYATI NINGSIH, SH., MH Perencana Ahli Madya	

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	JenisKegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Januari 2024
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung,

WILSON FAISOL, SE., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19700323 198903 1 001

Diverifikasi: Tanggal		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.Si Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
2	ZELDAYATI NINGSIH, SH., MH Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR E.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Bandar Lampung, Januari 2024

Mengetahui,
 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
 Riset dan Inovasi Daerah,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19700218 199303 2 002

Diverifikasi: Tanggal		Tanda Tangan
1	Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.Si Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	
2	ZELDAYATI NINGSIH, SH., MH Perencana Ahli Madya	

LAMPIRAN III.23

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

LEMBAR VERIFIKASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat, telah diverifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja
(Renja)

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dan selanjutnya
dapat diproses untuk disetujui dan disahkan oleh Walikota Bandar
Lampung melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

WILSON FAISOL, SE., MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19700323 198903 1 001

Mengetahui/Menyetujui :

Plt. KEPALA BAPPERIDA
KOTA BANDAR LAMPUNG,

VERIFIKATOR :

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
BAPPERIDA KOTA BANDAR LAMPUNG,

DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19700218 199303 2 002

Dr. REIN SUSINDA HESTY, S.Sos., M.Si

Pembina
NIP. 19800316 200312 2 005

KATA PENGANTAR

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026 dan Renstra Dinas 2021-2026, dan digunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, Januari 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

WILSON FAISOL, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700323 198903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB I Pendahuluan	3
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun Lalu.....	4
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ...	6
BAB IV Penutup	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan ..	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan..	23
3.3. Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 2	Data Realisasi PAD Tahun 2023	18
Tabel 3	Peningkatan Penerimaan PAD Dinas Perdagangan Dari Tahun 2022 ke Tahun 2023	18
Tabel 4	Penetapan Indikator Kinerja	21
Tabel 5	Program dan Kegiatan Tahun 2024	26
Tabel 6	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (APBD Kota) Kota Bandar Lampung	30

LAMPIRAN

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Lingkup Kota Bandar Lampung

Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung

Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2022 Kota Bandar Lampung

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Dinas Perdagangan Kota Bandar
Lampung

Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perdagangan adalah dokumen perencanaan Dinas Perdagangan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Dinas Perdagangan membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026 dan Renstra Dinas 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2025 untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Renstra Tahun 2021-2026 untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan tahun lalu dan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian keenam;
- i. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
- k. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
- l. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
- m. Surat Walikota Nomor : Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

M a k s u d

Memberikan arah kepada Dinas Perdagangan dalam menjalankan berbagai Program dan Kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

T u j u a n

- Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 1 (satu) Tahun;
- Untuk memberikan landasan kebijakan teknis strategi satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan dan penetapan Renja Dinas Perdagangan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perdagangan, proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan, keterkaitan antara Renja Dinas Perdagangan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perdagangan, dengan RPJMD Kota Bandar Lampung, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perdagangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perdagangan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perdagangan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perdagangan dan realisasi APBD untuk Dinas Perdagangan yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas Perdagangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perdagangan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategi suntuik ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan, usulan dari Kepala UPT Pasar dan pengamatan pelaksanaan **Musrenbang Kota** (bila sudah dilakukan).

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perdagangan.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra Dinas Perdagangan berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan tahun sebelumnya, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan tahun lalu, dan Realisasi Renstra Dinas Perdagangan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perdagangan dan realisasi APBD untuk Dinas Perdagangan.

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Urusan pilihan yang dilaksanakan yaitu : *Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung*:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sesuai dengan hasil Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 7.887.660.911,00** terserap sebesar **Rp. 7.456.175.006,00** atau capaian kinerja keuangan sebesar **94,52%**.

Pada Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merumuskan 4 (empat) Program berupa Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp. 5.340.400.000,- yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.313.538.182,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 80,77%.

Urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dengan Program/ Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.890.000.000,- terserap sebesar Rp. 1.219.817.600,- atau mencapai 64,54%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 65% berupa Rehab Pasar Bambu Kuning, Pembuatan Ruang Pelayananan Laboratorium Metrologi, Rehab Pasar Kangkung, Perbaikan Gerbang Lantai I & II Pasar Tugu, Rehab Pasar Cimeng, Rehab Paving Blok Pasar Tugu, Rehab Pasar Panjang, Rehab Gedung Kantor Pelayananan Tera Ulang Tangki Mobil.

2. Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pertama yaitu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terserap sebesar Rp. 91.577.250,- atau mencapai 91,58%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa pemantauan informasi harga barang pokok pada 8 Pasar (Pasar Smep, Pasar Pasir Gintung, Pasar Tugu, Pasar Way Halim, Pasar Tamin, Pasar Cimeng, Pasar Kangkung/Gudang Lelang, Pasar Panjang) di Kota Bandar Lampung setiap hari melalui aplikasi siagabapok Bandar Lampung, pengadaan fasilitas pemantauan harga dan stock barang berupa LG Smart TV 43” sebanyak 4 unit dan pengadaan fasilitas peralatan komputer serta maintenance website siaga bapak Bandar Lampung www.siagabapokbandarlampung.id

Sub Kegiatan Kedua yaitu Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.590.550.000,- terserap sebesar Rp. 2.352.783.458,- atau mencapai 90,82%. Realisasi Pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa :

- Pelaksanaan Operasi Pasar di 20 Kecamatan pada tanggal 15, 22 dan 29 April 2022
- Pelaksanaan Operasi Pasar di 10 Kecamatan pada tanggal 17, 20, 27 September dan 6, 11, 20 Oktober 2022
- Pelaksanaan Operasi Pasar di 10 Kecamatan pada tanggal 26 Oktober 2022, dan 3, 8, 17, 22 November 2022 dan 1 Desember 2022.

3. *Program Pengembangan Ekspor didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :*

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdampak pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 559.850.000,- terserap sebesar Rp. 548.829.774,- atau mencapai 98,03%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa terlaksananya kegiatan promosi perdagangan tercapai 7 kali berupa terlaksananya promosi produk-produk unggulan dari Daerah Kota Bandar Lampung pada Pameran yang dilaksanakan di Luar Daerah yaitu Pameran Kriya Nusa 2022 (JCC Jakarta), TEI Expo 2022 (BSD Tangerang), Jogja TTI Expo 2022 (Jogja City Mall), Bandar Lampung Expo 2022 (Lapangan Way Dadi Bandar Lampung), Road Show Bus KPK (Bandar Lampung), Lampung Craft 2022 (Graha Wangsa Bandar Lampung, Lampung Fair 2022 (PKOR Bandar Lampung).

4. *Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen didukung oleh 1 (satu) kegiatan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :*

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Sub Kegiatan Pertama yaitu Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi keuangan Rp. 61.918.350,- atau 61,92%. Realisasi pencapaian Kinerja output sebesar 95,47% berupa 1.814 UTTP dari target 1.900 UTTP.

Sub Kegiatan Kedua yaitu Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi keuangan Rp. 38.611.750,- atau 38,61%. Realisasi pencapaian Kinerja output sebesar 513% berupa 4.619 UTTP yang diawasi dari target 900 UTTP.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sesuai dengan hasil Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 8.774.684.932,00** terserap sebesar **Rp. 7.227.573.400,00** atau capaian kinerja keuangan sebesar 82,37%.

Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merumuskan 5 (lima) Program berupa Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 3.794.876.018,- yang didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.272.287.236,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 86,23%.

Urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dengan Program/ Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 383.856.393,- terserap sebesar

Rp. 374.107.793,- atau mencapai 97,46%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 97,5% berupa Pembayaran Hutang Perbaikan Drainase dan Pembayaran Hutang Retensi Rehab tahun 2022.

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 567.000.000,- terserap sebesar Rp. 340.226.775,- atau mencapai 60,00%. Pembuatan TPS (Tempat Penampungan Sementara) pencairannya menjadi terhutang yang dibayar di Tahun 2024. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa Pendataan, Penataan, Penertiban Relokasi Pedagang Pasar Pasir Gintung dan Pembongkaran Tempat Berdagang.

- Pelaksanaan Pendataan tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023
- Penataan, Penertiban, Relokasi Pedagang dan Pembongkaran tempat berdagang tanggal 11 sampai dengan 15 September 2023
- Pengawasan Pedagang Kaki Lima tanggal 16 September 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023
- Pembuatan TPS tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terserap sebesar Rp. 58.825.850,- atau mencapai 78,43%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa pengawasan perizinan dan pengawasan minuman beralkohol.

Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 165.500.000,- terserap sebesar Rp. 155.529.400,- atau mencapai 95,71%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa Pendataan Potensi PAD Kota Bandar Lampung yang ada pada Dinas Perdagangan. Pelaksanaan Pendataan di 8 UPT dan rumah toko area Tanjung Karang serta toko/kios di Stadion Mini Way Dadi.

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengendalian Harga, Stok, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pertama yaitu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- terserap sebesar Rp. 60.627.390,- atau mencapai 75,78%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa pemantauan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada 8 Pasar (Pasar Smep, Pasar Pasir Gintung, Pasar Tugu, Pasar Way Halim, Pasar Tamin, Pasar Cimeng, Pasar Kangkung/Gudang Lelang, Pasar Panjang) di Kota Bandar Lampung setiap hari melalui aplikasi siagabapok Bandar Lampung, serta maintenance aplikasi pusat informasi harga pasar.

Sub Kegiatan Kedua yaitu Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.660.525.000,- terserap sebesar Rp. 1.597.601.405,- atau mencapai 96,21%. Realisasi Pencapaian kinerja output sebesar 100,00% berupa :

- Pelaksanaan Operasi Pasar di 20 Kecamatan/126 Kelurahan tanggal 24, 27, 28, 29, 30 dan 31 Maret 2023
tanggal 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17 dan 18 April 2023
- Pelaksanaan Operasi Pasar di 20 Kecamatan/126 Kelurahan
Tahap 1 : tanggal 23, 24, 25, 26, 30, 31 Oktober 2023 dan tanggal 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 November 2023
Tahap 2 : tanggal 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 November 2023 dan tanggal 4, 5, 6, 7 Desember 2023

3. Program Pengembangan Ekspor didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang berdampak pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 406.209.625,- terserap sebesar Rp. 373.860.873,- atau mencapai 92,04%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 120% berupa terlaksananya kegiatan promosi perdagangan tercapai 6 kali berupa terlaksananya promosi produk-produk unggulan dari Daerah Kota Bandar Lampung pada Pameran yang dilaksanakan yaitu Pameran Jakarta Kreatif Expo 2023, Lampung Craf ke 4 Tahun 2023, Bandar Lampung Expo 2023, Kriya Nusa 2023, Pekan Raya Lampung 2023, MTQ Ke 50 Tahun 2023.

4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Sub Kegiatan Pertama yaitu Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran Rp. 166.300.000,- terealisasi keuangan Rp. 137.520.550,- atau 82,69%. Realisasi pencapaian Kinerja output sebesar 98,9% berupa 1.978 UTTP dari target 2.000 UTTP.

Sub Kegiatan Kedua yaitu Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan anggaran Rp. 168.485.000,- terealisasi keuangan Rp. 89.427.150,- atau 53,08%. Realisasi pencapaian Kinerja output sebesar 109,1% berupa 1.091 UTTP yang diawasi dari target 1.000 UTTP. Walaupun realisasi keuangan tercapai 53,08% namun konsumen yang akan melakukan tera ulang banyak yang datang langsung ke kantor Dinas Perdagangan.

5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 125.000.000,- terealisasi keuangan Rp. 84.560.050,- atau 67,65%. Realisasi pencapaian Kinerja output sebesar 100% berupa Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan tema “Sertifikasi produk sebagai sarana meningkatkan daya saing produk UMKM” sebanyak 92 UMKM.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan meliputi Perdagangan, Pengelolaan Pasar dan Metrologi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung selalu aktif dan profesional, hal ini tercermin pada beberapa program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan antara lain :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Program Pengembangan Ekspor

4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Disamping sebagai Dinas teknis yang merumuskan kebijakan dibidang Perdagangan juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu Dinas yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengelolaan pasar antara lain sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Pasar
2. Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Retribusi Sewa Toko
3. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
4. Penerimaan Royalti Pasar bambu Kuning dan Pasar Tugu

Tabel 1
Capaian Kinerja Tahun 2023

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.188.356.393,00	928.689.818,00	78,15	259.666.575,00
Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	950.856.393,00	714.334.568,00	75,13	236.521.825,00
1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	383.856.393,00	374.107.793,00	97,46	9.748.600,00
2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	567.000.000,00	340.226.775,00	60,00	226.773.225,00
Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	237.500.000,00	214.355.250,00	90,25	23.144.750,00
1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	75.000.000,00	58.825.850,00	78,43	16.174.150,00
2. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	162.500.000,00	155.529.400,00	95,71	6.970.600,00

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.740.525.000,00	1.658.228.795,00	95,27	82.296.205,00
Kegiatan : Pengendalian Harga, Stok, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.740.525.000,00	1.658.228.795,00	95,27	82.296.205,00
1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	80.000.000,00	60.627.390,00	75,78	19.372.610,00
2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.660.525.000,00	1.597.601.405,00	96,21	62.923.595,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	406.209.625,00	373.860.873,00	92,04	32.348.752,00
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	406.209.625,00	373.860.873,00	92,04	32.348.752,00
1. Pameran Dagang Nasional	406.209.625,00	373.860.873,00	92,04	32.348.752,00
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	334.785.000,00	226.947.700,00	67,79	107.837300,00
Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	334.785.000,00	226.947.700,00	67,79	107.837300,00
1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	166.300.000,00	137.520.550,00	82,69	28.779.450,00
2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	168.485.000,00	89.427.150,00	53,08	79.057.850,00

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	125.000.000,00	84.560.050,00	67,65	40.439.950,00
Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	125.000.000,00	84.560.050,00	67,65	40.439.950,00
1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	125.000.000,00	84.560.050,00	67,65	40.439.950,00
JUMLAH	3.794.876.018,00	3.272.287.236,00	86,00	522.588.782,00

Tabel 2
Data Realisasi PAD Tahun 2023

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	BOBOT
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	2.254.346.650,00	1.225.038.000,00	54,34%
2.	Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Retribusi Sewa Toko	1.452.557.025,00	1.516.784.000,00	104,42%
3.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan	30.000.000,00	89.641.500,00	298,81%
4.	Penerimaan Royalty Pasar Bambu Kuning dan Tugu	1.400.000.000,00	-	0,00%
	Jumlah	5.136.903.675,00	2.831.463.500,00	55,12%

Secara keseluruhan pada tahun 2023 target penerimaan PAD Dinas Perdagangan ditetapkan sebesar Rp. 5.136.903.675,- terealisasi hanya sebesar Rp. 2.831.463.500,- atau 55,12% dari target. Hal ini menunjukkan adanya penurunan Penerimaan PAD sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Tahun 2022 dari Target Rp. 4.136.903.675,00,- terealisasi sebesar 2.380.042.000,00,- atau 57,53% seperti terlihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3.
Penerimaan PAD Dinas Perdagangan
Dari Tahun 2022 ke Tahun 2023

NO	TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	2022	4.136.903.675,00	2.380.042.000,00	57,53%
2.	2023	5.136.903.675,00	2.831.463.500,00	55,12%

Terhadap Target Penerimaan Royalti Pasar Bambu Kuning dan Pasar Tugu ditetapkan sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Royalti Pasar Tugu sebesar **Rp. 646.216.890,-**. **Pasar Bambu Kuning** sebesar **Rp. 753.783.110,-** belum ada realisasi dan sudah di berikan surat teguran.

Terhadap tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 secara garis besar dapat kami ihtisarkan sebagai berikut :

Untuk pengelolaan Penerimaan Retribusi :

Retribusi pelayanan pasar dan pengelolaan KM/WC yang dilaksanakan penagihan/pungutan secara harian pada potensi pedagang tidak tercapai disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Tidak sedikit dari Wajib Retribusi (Pedagang) yang tidak dapat melanjutkan aktifitas niaga/berdagang (bangkrut/tutup) sehingga potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar menjadi tidak maksimal.*

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung saat ini hanya mengelola 8 (delapan) Pasar Tradisional (Pasar Bambu Kuning, Pasar Bawah, Pasar Cimeng, Pasar Kangkung, Pasar Panjang, Pasar SMEP, Pasar Tamin, dan Pasar Tugu) sedangkan 2 (dua) Pasar Tradisional (Pasar Pasir Gintung dan Pasar Way Halim) belum serah terimakan kewenangan pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung sehingga berdampak pada tidak maksimalnya penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar;

- 2) *Terdapat Tunggakan Setoran Pihak Ketiga PT. Cahaya Karunia Baru sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2022 sejumlah Rp. 87.360.000,-*
- 3) *Terdapat Tunggakan Setoran Pihak Ketiga PT. Cahaya Karunia Baru/Pasar Gudang Lelang bulan Desember 2023 sejumlah Rp. 10.920.000,-*
- 4) *Terdapat Tunggakan Royalty pengembang Pasar Tugu PT. Prabu Makmur sebesar Rp. 646.216.890,- dan Pasar Bambu Kuning PT. Sanjaya Rezeki Mas sejumlah Rp. 753.783.110,-.*

Solusi yang diambil dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut diatas antara lain :

- a. Terhadap Tunggakan dari PT. Cahaya Kurnia Baru akan dilakukan penagihan pada tahun 2024.
- b. Terhadap tunggakan pembayaran Royalty Pasar Tugu dan Pasar Bambu Kuning akan dilakukan penagihan kembali kepada PT. Prabu Makmur dan PT. Sanjaya Rezeki Mas pada tahun 2024.

a. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 63 Tahun 2021 maka tugas pokok dan fungsinya adalah :

Tugas Pokok

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar dan Metrologi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan pemberdayaan konsumen, standarisasi tertib ukur, serta pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen;

2. Semakin meningkatnya animo masyarakat untuk berprofesi sebagai pedagang dalam sektor formal;
3. Belum terbangunnya kesadaran Pedagang Kaki Lima tentang ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar;
4. Terkelolanya PAD dari sektor retribusi pasar yang semakin meningkat;

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja sasaran melalui tahapan Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis dikator yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Tabel 4
Penetapan Indikator Kinerja

URUSAN PERDAGANGAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)
1	2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase Jumlah Pasar yang Ditata
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga barang Pokok dan bahan Penting
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok Di Pasar Tradisional
1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegritasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
2. Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
URUSAN PERDAGANGAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)
1	2
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Dagang Tingkat Nasional yang Diikuti
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang
	Persentase Jumlah UTTP yang Diawasi
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera ulang
	Jumlah UTTP BDKT dan SN yang Sudah Diawasi
	Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi
1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
2. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli daerah
Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan, seperti Tabel T-C.31 terlampir

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka perwujudan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam kaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perdagangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan 2021-2026 yang memuat visi, misi, nilai-nilai, penilaian dan kajian lingkungan eksternal dan internal, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi keberhasilan dari Tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran dibidang perdagangan.

Renja ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Dengan berpedoman dengan Renja ini, satuan kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kondisi yang diharapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal dari kota/kabupaten lainnya. Meningkatnya persaingan tantangan dan

tuntutan masyarakat akan sejahtera, adil dan demokrasi tidak akan bisa dihindari. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mempersiapkan visinya yang dapat dijemput oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di Kota Bandar Lampung.

Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.

Dinas Perdagangan mengemban Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ke 4 yaitu : ***”Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan”***

Visi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, yaitu :

“Terwujudnya Perdagangan Kota Bandar Lampung yang berkualitas dan berdaya Saing berbasis Ekonomi Kerakyatan”

Dengan visi tersebut diatas, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berhubungan dengan Perdagangan, perpasaran, dan kemetrolgian akan berupaya seoptimal mungkin guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dengan didukung oleh keinginan segenap Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk selalu melakukan perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Sedangkan **Misi Dinas Perdagangan** yaitu :

1. Meningkatkan dan memperkuat sektor Perdagangan Kota Bandar Lampung;
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur pembangunan pasar;
3. Meningkatkan pengawasan tertib ukur.

T u j u a n

Sebagai penjabaran dari Misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, yaitu :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, struktur perekonomian yang kokoh, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;

2. Mewujudkan kenyamanan bagi pedagang, pembeli pengunjung dan pengguna pasar;
3. Mewujudkan peningkatan dan pengembangan tertib ukur.

S a s a r a n

Sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai pada jangka pendek dengan ditetapkannya sasaran, diharapkan Tujuan dapat tercapai.

Sasaran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, sebagai alat ukur tercapainya kinerja Kebijakan dan Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah;
2. Terciptanya pasar tradisional modern yang tertib, bersih dan indah;
3. Terlaksananya tertib ukur.

S t r a t e g i

Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sektor unggulan dan strategis daerah secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

K e b i j a k a n

Penetapan **Kebijakan** oleh **Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung,** yaitu:

1. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2. Stabilitas harga pasar
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan
4. Peningkatan pengawasan barang beredar di pasar
5. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
6. Peningkatan perlindungan konsumen
7. Melaksanakan penataan dan penertiban pedagang di lingkungan pasar
8. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan pasar
9. Meningkatnya disiplin pedagang kaki lima.
10. Mengadakan Pendataan potensi UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	LOKASI	DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
	URUSAN PILIHAN			
	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN			
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase Jumlah Pasar yang Ditata	B. L.	430.409.943,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		250.000.000,00
1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	B. L.	250.000.000,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		180.409.943,00
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	B. L.	70.909.943,00
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	B. L.	109.500.00,00

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	LOKASI	DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga barang Pokok dan bahan Penting		719.087.726,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok Di Pasar Tradisional		719.087.726,00
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	B. L.	154.537.726,00
2	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	B. L.	564.550.000,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		494.207.797,00
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Dagang Tingkat Nasional yang Diikuti		494.207.797,00
1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	B. L.	494.207.797,00
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	B. L.	200.014.492,00
		Persentase Jumlah UTTP yang Diawasi		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) / KEGIATAN (OUT PUT)	LOKASI	DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera ulang		200.014.492,00
		Jumlah UTTP BDKT dan SN yang Sudah Diawasi		
		Pelanggaran UURL		
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	B. L.	100.000.000,00
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	B. L.	100.014.492,00
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli daerah		141.644.597,00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online		141.644.597,00
1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		141.644.597,00
	JUMLAH			1.985.364.555,00

Terlampir disampaikan Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Bandar Lampung.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung seperti Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Rencana Kerja dan Pendanaan
Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (APBD KOTA)
Kota Bandar Lampung

DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	NON URUSAN					
3 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Urusan Penunjang Pemerintah Bidang Perdagangan	98%	13.689.786.033,00	98%	13.804.751.039,00
3 30 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	103.944.000,00	100%	103.944.000,00
	Sub Kegiatan :					
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	103.944.000,00	12	103.944.000,00
3 30 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100%	10.074.655.092,00	100%	10.074.655.092,00
	Sub Kegiatan :					
	01 Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	9.876.475.092,00	95 Orang/ Bulan	9.876.475.092,00
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	198.180.000,00	12 Dokumen	198.180.000,00
3 30 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00
	Sub Kegiatan :					
	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000,00	4 Orang	20.000.000,00
3 30 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	402.811.720,00	98%	435.961.076,00
	Sub Kegiatan :					
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.022.097,00	1 Paket	72.910.411,00
	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.679.198,00	1 Paket	9.679.198,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7				
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.000.000,00	1 Paket	33.000.000,00				
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Yang Tersedia	1 Paket	143.610.425,00	1 Paket	155.871.467,00				
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	4.500.000,00	6 Dokumen	4.500.000,00				
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00				
3	30	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	562.384.096,00	98%	630.217.600,00
					Sub Kegiatan :					
				02	Pengadaan Kendaraan DinS Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	63.000.000,00	-	63.000.000,00
				05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	50 Unit	153.027.727,00	50 Unit	180.830.500,00
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	10 Unit	185.411.000,00	10 Unit	210.952.100,00
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	160.945.369,00	10 Unit	175.435.000,00
3	30	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98%	1.986.392.324,00	98%	2.000.374.470,00
					Sub Kegiatan :					
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.857.324,00	12 Laporan	134.839.470,00
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.865.535.000,00	12 Laporan	1.865.535.000,00
3	30	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98%	539.598.801,00	98%	539.598.801,00
					Sub Kegiatan :					
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	74.430.000,00	1 Unit	74.430.000,00
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	272.130.000,00	15 Unit	272.130.000,00
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.040.000,00	15 Unit	17.040.000,00
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	15 Unit	175.998.801,00	15 Unit	175.998.801,00

						JUMLAH NON URUSAN		13.689.786.033,00		13.804.751.039,00	
KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7
URUSAN PILIHAN											
BIDANG PERDAGANGAN											
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PRESENTASE JUMLAH PASAR YANG DITATA	20,00	657.000.000,00	20,00	675.375.000,00
3	30	03	2	01		<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>2 Pasar</i>	<i>467.500.000,00</i>	<i>2 Pasar</i>	<i>485.875.000,00</i>
Sub Kegiatan :											
					01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	217.500.000,00	2 Unit	235.875.000,00
					02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	250.000.000,00	3 Unit	250.000.000,00
3	30	03	2	02		<i>Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	<i>Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>3 Kelompok Pelaku Usaha</i>	<i>189.500.000,00</i>	<i>3 Kelompok Pelaku Usaha</i>	<i>189.500.000,00</i>
Sub Kegiatan :											
					01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00
					02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi perdagangan	1 Laporan	109.500.000,00	1 Laporan	109.500.000,00
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	16	719.087.726,00	16	719.087.726,00
3	30	04	2	02		<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>Mengendalikan Fluktuasi Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional</i>	<i>9 Pasar</i>	<i>719.087.726,00</i>	<i>9 Pasar</i>	<i>719.087.726,00</i>
Sub Kegiatan :											
					02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	154.537.726,00	1 Laporan	154.537.726,00
					03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)	1 Laporan	564.550.000,00	1 Laporan	564.550.000,00
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	100	668.346.111,00	100	701.763.417,00
3	30	05	2	01		<i>Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kegiatan Promosi Dagang Tingkat Nasional Yang di ikuti</i>	<i>5 Kali</i>	<i>668.346.111,00</i>	<i>5 Kali</i>	<i>701.763.417,00</i>
Sub Kegiatan :											

					02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	668.346.111,00	5 Pelaku Usaha	701.763.417,00
KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/ Tera Ulang	87%	200.014.492,00	87%	200.014.492,00
							Persentase Jumlah UTTP Yang Diawasi	87%		87%	
3	30	06	2	01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera ulang	2.100 UTTP	200.014.492,00	2.100 UTTP	200.014.492,00
							Jumlah UTTP BDKT dan SN yang Sudah Diawasi	1.100 UTTP		1.100 UTTP	
							Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Metrologi	4 Kasus		4 Kasus	
Sub Kegiatan :											
					01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2.100 UTTP	100.000.000,00	2.100 UTTP	100.000.000,00
					02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	210 Orang	100.014.492,00	230 Orang	100.014.492,00
3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Keikutsertaan Pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah	70	157.500.000,00	70	165.375.000,00
3	30	07	2	01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Perdagangan Melalui Pasar Online	50 UMKM	157.500.000,00	50 UMKM	165.375.000,00
Sub Kegiatan :											
					06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 UMKM	157.500.000,00	20 UMKM	165.375.000,00
JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN									2.401.948.329,00		2.461.615.635,00
JUMLAH TOTAL NON URUSAN + URUSAN PERDAGANGAN									16.091.734.362,00		16.266.366.674,00

BAB V. PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung, dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandar Lampung.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan maka diharapkan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dapat berhasil. Keberhasilan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 untuk menjadi landasan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung 1 (satu) tahun kedepan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

WILSON FAISOL, SE., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700323 198903 1 001